

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dilihat dari kutipan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan LPPI (2015) tentang profil UMKM menyatakan, “Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis melanda pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia menerapkan program bantuan modal bagi para calon dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan di Indonesia yaitu pada industri perbankan. Pemerintah menilai bahwa semakin banyak UMKM yang muncul, maka perekonomian di Indonesia dapat semakin bertumbuh, menyerap lebih banyak calon tenaga kerja baru dan membuat perekonomian di Indonesia menjadi lebih stabil.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pasca tahun 1997 – 1998 dikatakan bahwa pasca krisis tersebut jumlah UMKM yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun – tahun sebelumnya.

UMKM mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai dengan tahun 2012. Pada tahun tersebut tercatat jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dengan didominasi oleh jumlah UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha diluar UMKM.

UMKM di Indonesia merupakan sebuah usaha perorangan dengan tiga tingkatan yang berbeda – beda berdasarkan dari jumlah karyawannya. Suatu usaha disebut sebagai usaha mikro jika jumlah karyawan sampai dengan 10 orang, usaha kecil jika jumlah karyawan antara 11 sampai dengan 30 orang, serta usaha menengah dengan jumlah karyawan antara 31 sampai dengan 300 orang. Ketiga tingkatan usaha tersebut lebih cenderung minim pengetahuan dalam mengembangkan usaha, sehingga risiko usaha mengalami kegagalan cukup tinggi. Minimnya pengetahuan dalam upaya pengembangan usaha, memaksa pemerintah selain memberikan program bantuan pinjaman juga wajib memperhatikan tingkat pengetahuan dan pendidikan para calon usaha UMKM. Tanpa pengajaran dan bimbingan yang tepat, akan menyebabkan semakin tinggi risiko kredit macet pembayaran hutang UMKM kepada bank sehingga memberikan efek domino terhadap meningkatnya risiko gagal bayar bagi industri – industri perbankan di Indonesia dalam upaya membayar liabilitasnya.

Penerapan program bantuan modal oleh pemerintah bagi para calon dan pelaku UMKM tersebut adalah melalui kebijakan kredit perbankan

yang diputuskan dan diatur oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral milik Indonesia. Kebijakan BI mewajibkan semua industri perbankan di Indonesia untuk memberikan kemudahan pemberian kredit bagi para calon dan pelaku UMKM. Kebijakan tersebut terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/ PBI/2012 tentang “Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah” dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 tentang “Perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah”.

Menurut kutipan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan LPPI (2015) tentang profil UMKM menyatakan bahwa dukungan terhadap kebijakan kredit perbankan bagi UMKM diperkirakan akan meningkatkan risiko usaha bagi industri perbankan. Beberapa risiko tersebut adalah:

1. Belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap.
2. Pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran produknya.

3. Kendala dalam mengakses teknologi. Karena pasar dikuasai oleh perusahaan/kelompok bisnis tertentu.
4. Kurang memiliki kemampuan mengikuti selera konsumen yang cepat berubah.
5. Kualitas produk dan produktivitas masih rendah.
6. Keterbatasan dalam mendapatkan pasokan bahan baku.
7. Tenaga pengelola dan produksi kurang terampil.
8. Seringkali bisnis UMKM dikelola oleh keluarga dan biasanya *one man show*, artinya sangat tergantung kepada orang tertentu, sehingga keberlanjutan perusahaan tergantung pada figur bukan sistem.
9. Bisnis UMKM seringkali masih sederhana dalam mengelola keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliannya, sehingga rawan terhadap penyelewengan.
10. Pelaku UMKM kesulitan dalam menyediakan agunan yang dibutuhkan bank.

Beberapa permasalahan diatas merupakan risiko tambahan bagi industri perbankan karena adanya kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung perkembangan UMKM ini. Sebelum munculnya kebijakan UMKM, industri perbankan sudah memiliki permasalahan sendiri. Salah satu tugas utama bank adalah sebagai perantara keuangan di mana bank berkewajiban menyimpan, menyediakan dana, serta mengembalikan dana simpanan ketika nasabah ingin mencairkan dananya di bank tersebut. Selain itu, bank juga mengolah dana yang

terkumpul dari simpanan masyarakat untuk dikembangkan sehingga menjadi pendapatan bank tersebut. Beberapa upaya pengelolaan adalah dengan memberikan pinjaman kredit pada masyarakat lain (termasuk kelompok UMKM), sebagai bank penerima valuta asing, dan lain sebagainya. Banyaknya cara mengelola dana yang ada pada masing – masing bank, berdasarkan pada setiap jenis golongan bank yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktori Perbankan Indonesia jenis bank di Indonesia terbagi dalam enam golongan yaitu Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional devisa (BUSN Devisa), Bank Umum Swasta Nasional non Devisa (BUSN non Devisa), Bank Campuran dan Bank Asing. Bank Persero dan BPD adalah bank yang kepemilikannya banyak berasal dari pemerintah. BUSN Devisa merupakan bank milik swasta yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat melakukan transaksi valuta asing, sedangkan BUSN non Devisa merupakan kepemilikan swasta yang tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi valuta asing. Terakhir adalah bank campuran dan bank asing adalah bank yang sebagian besar modalnya di miliki oleh sektor asing.

Umumnya untuk sektor perbankan swasta, BUSN Devisa selain memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada BUSN non Devisa juga lebih dipercaya dalam hal penyimpanan dana oleh masyarakat. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank di

Indonesia, semakin besar juga tanggung jawab bank karena banyaknya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank tersebut. Besarnya dana yang masuk, menyebabkan semakin banyak dana yang harus dikelola oleh bank. Pengelolaan dana umumnya adalah dengan memberikan pinjaman pada masyarakat lain.

Dapat dibayangkan jika dalam satu waktu, terdapat banyaknya debitur UMKM yang macet pembayaran kredit dan pada saat yang sama juga banyak nasabah yang ingin mengambil dana tabungan. Maka muncul peluang gagal bayar oleh bank pada para kreditur. Terjadinya risiko gagal bayar pada suatu bank, akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada bank terkait, oleh karena itu masing – masing bank di Indonesia wajib memperhatikan peluang dari risiko gagal bayar sekecil apapun risiko tersebut.

Walaupun saat ini kebijakan kredit mewajibkan adanya jaminan, tetapi seperti yang terjadi pada krisis 2008 di Amerika Serikat yaitu karena pengajuan KPR yang berlebihan sehingga perputaran dana bank terhambat karena banyak yang terjadi gagal bayar dan beralih menjadi aset tetap sitaan yang susah untuk dijual oleh pihak bank. Ditakutkan dengan munculnya program kebijakan kredit UMKM ini, dapat mengakibatkan meningkatnya risiko gagal bayar kredit bank yang sangat besar sehingga aliran dana bank terhambat dan terjadi krisis seperti tahun 2008 lalu.

Penilaian risiko menurut Hadad (2004), “ Penilaian risiko kredit merupakan hal yang penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya, karena kredit yang tidak tertagih khususnya yang tidak terantisipasi akan menekan modal bank bersangkutan”. Pendapat tersebut menekankan bahwa sangat penting bagi industri perbankan memperhatikan risiko kredit yang ada agar dapat menjaga kegiatan operasionalnya. Semakin banyak debitur yang tidak mampu membayar hutang pada bank, akan semakin menurunkan modal bank tersebut. Penurunan modal yang signifikan akan mengarahkan bank tersebut menuju kegagalan dalam membayar tagihan pada kreditur.

Menurut Konstituanto (2011), “ ... kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan rasional, sehingga sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya”. Usaha perbankan adalah sebuah usaha pengolahan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga merupakan suatu industri perputaran dana yang sangat lancar. Terhambatnya perputaran dana menyebabkan munculnya risiko kegagalan suatu bank, di mana risiko kegagalan tersebut harus dapat diukur dan diprediksi secara nyata sejak awal agar perbankan dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya risiko tersebut.

Peluang risiko gagal bayar dalam pemberian kredit pada industri perbankan dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Pedoman tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bank

Indonesia No 03/ 30/ DPNP tanggal 14 Desember 2001. Perhitungan rasio yang digunakan adalah pada sektor aktiva produktif dengan rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB), *Non Performing Loan Net* (NPL Net), pada sektor Rentabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), pada sektor Likuiditas dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan pada sektor permodalan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Aktiva Tetap Terhadap Modal (ATTM)

Selain perhitungan rasio untuk mengukur risiko gagal bayar, pada sebuah buku Manajemen risiko Perbankan dalam konteks kesepakatan Basel dan peraturan BI oleh Idroes dan Sugiarto (2006, hal 89-90), “... menurut Merton, perbedaan antara penilaian modal dan utang dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan untuk gagal bayar (*Probability of default*). Semakin dekat dengan nol hasil dari penilaian ini, maka semakin besar kemungkinan pemilik perusahaan tidak dapat membayar hutangnya. Pada titik ini, ekuitas tidak lagi mempunyai nilai karena perusahaan telah memiliki utang yang lebih besar daripada nilai perusahaan”. Pada model Merton, hal utama penilaian gagal bayar perbankan adalah dilihat dari modal dan utang perbankan itu sendiri. Besarnya modal terhadap utang yang dimiliki oleh suatu perbankan, mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Jika selisih modal terhadap utang semakin mendekati nol, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat mengalami gagal bayar.

Umumnya dalam melakukan analisa kinerja perbankan dilakukan penilaian menggunakan rasio keuangan perbankan yang sudah menjadi pedoman utama oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Merton (1974) memperkenalkan model penelitian baru tentang penilaian kegagalan suatu perusahaan di mana model tersebut dapat juga digunakan untuk penilaian probabilitas kegagalan bayar pada industri perbankan. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang melihat pengaruh dari penggunaan rasio keuangan perbankan terhadap probabilitas kegagalan bayar suatu bank. Konstitunto dkk (2011) & Agus dkk (2012) menyatakan bahwa rasio keuangan mampu menjelaskan lebih dari 85% hasil dari probabilitas kegagalan bayar suatu bank dengan menggunakan model Merton.

Fenomena meningkatnya dorongan pemerintah pada bank swasta dalam kemudahan pemberian kredit untuk golongan usaha UMKM di Indonesia, menyebabkan peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang risiko terjadinya gagal bayar industri perbankan di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dibuatlah penelitian tentang “Analisis pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap probabilitas gagal bayar bank umum swasta nasional devisa pada kreditur, dalam upaya menjalankan pemberian kredit pada UMKM di Indonesia dengan menggunakan Merton model”.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena munculnya kebijakan kredit UMKM oleh pemerintah bagi industri perbankan di Indonesia, menyebabkan munculnya peluang gagal bayar yang lebih besar pada industri perbankan terutama industri perbankan swasta devisa (BUSN Devisa) yang tingkat perputaran uang lebih tinggi daripada perbankan Swasta non Devisa.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, identifikasi masalah yang di peroleh adalah:

1. Apakah rasio APB berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
2. Apakah rasio NPL Net berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
3. Apakah rasio ROA berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
4. Apakah rasio NIM berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
5. Apakah rasio BOPO berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?

6. Apakah rasio LDR berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
7. Apakah rasio CAR berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
8. Apakah rasio ATTM berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?
9. Apakah terdapat pengaruh rasio APB, NPL Net, ROA, NIM, BOPO, LDR, CAR, dan ATTM secara menyeluruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model?

1.4 Manfaat dan tujuan penelitian

Manfaat penelitian:

1. Bagi pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan kredit bagi UMKM di Indonesia dengan memperhatikan tingkat kesehatan perbankan
2. Bagi industri bank swasta umum nasional devisa di Indonesia
Sebagai pemberi informasi terhadap faktor – faktor apa saja yang harus diperhatikan serta pemberi peringatan dini agar dapat terhindar dari risiko gagal bayar tersebut

3. Bagi para pihak pemangku kepentingan
Sebagai informasi pengambilan keputusan investasi pada industri perbankan saat ini

Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis rasio APB berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
2. Menganalisis rasio NPL Net berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
3. Menganalisis rasio ROA berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
4. Menganalisis rasio NIM berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
5. Menganalisis rasio BOPO berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model

6. Menganalisis rasio LDR berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
7. Menganalisis rasio CAR berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
8. Menganalisis rasio ATTM berpengaruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model
9. Menganalisis pengaruh rasio APB, NPL Net, ROA, NIM, BOPO, LDR, CAR, dan ATTM secara menyeluruh terhadap risiko gagal bayar pada bank umum swasta nasional devisa dengan menggunakan Merton model

1.5 Sistematika penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang hal – hal yang menjadi fenomena awal dibuatnya penelitian ini yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Keputakaan

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dari penelitian ini dan penelitian – penelitian terdahulu.

BAB III : Rerangka Pemikiran, Model dan Hipotesis Penelitian

Pada bab ini berisi tentang rerangka, model, dan hipotesis dari penelitian.

BAB IV : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang populasi yang menjadi obyek penelitian serta teknik pengambilan sampel, metode serta teknik analisis dan gambaran mengenai operasional variabel yang digunakan.

BAB V : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini dan pembahasan hasil penelitian tersebut.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil dari seluruh penelitian ini serta saran – saran untuk peneliti berikutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitiannya.